

BAB II

LATAR BELAKANG OPERASI MILITER RUSIA TERHADAP UKRAINA

2.1 Hubungan Ukraina Sebelum Tahun 2014

Semenjak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 hingga peristiwa Euromaidan pada tahun 2014, Ukraina dan Rusia era pasca-Soviet memiliki beberapa pergolakan hubungan. Diawali dengan Ukraina memproklamasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991 dari Uni Soviet dan diakui oleh Rusia kemerdekaannya pada tanggal 26 Desember 1991 dibawah kepemimpinan presiden Boris Nyelstain.¹⁵ Ini menandakan permulaan hubungan diplomatik formal antara kedua negara. Pada awalnya, hubungan Rusia dan Ukraina cukup baik dengan menandatangani perjanjian persahabatan, kerjasama dan kemitraan pada 1997 yang mengatur dasar hubungan keduanya¹⁶. Namun, terdapat sejumlah isu kompleks yang memerlukan menjadi pemicu konflik antar dua negara. Seperti pembagian angkatan laut Uni Soviet. Rusia ingin mempertahankan pangkalan utama angkatan laut soviet di Sevastopol, Krimea, yang berada di wilayah Ukraina. Pada 1997 kedua negara sepakat berbagi angkatan laut, Laut Hitam dan Rusia diberi hak sewa pangkalan Sevastopol sampai 2017. Kedua, perselisihan terkait status Krimea dimana Rusia khawatir kehilangan pengaruhnya di Krimea jika wilayah ini

¹⁵ Martin Bakers, *Penurunan Uni Soviet Dan Genosida Rezim Komunis*, Vol.3 (Cambridge Stanford Books, n.d.).

¹⁶ Frassminggi Kamasa, *Krisis Ukraina Dan Dampaknya Terhadap Tatanan Politik Global Dan Regional*, Jurnal Penelitian Politik 11, no. 1 (2014): 79–108, diakses dari <http://eng.kremlin.ru/news/4145>,.

sepenuhnya di bawah kontrol Ukraina. Ketiga, pengaruh Rusia di Ukraina. Setelah merdeka, Rusia khawatir kehilangan pengaruhnya di Ukraina. Ukraina perlahan berupaya mengurangi ketergantungan terhadap Rusia dan menjalani hubungan lebih erat dengan Barat. Meskipun kedua negara berusaha mempertahankan hubungan bilateral, isu sensitif seperti Krimea dan pembagian warisan militer Soviet mulai mengikis hubungan Ukraina-Rusia.¹⁷ Secara umum, ketegangan timbul karena Rusia berusaha mempertahankan pengaruhnya di Ukraina, sementara Ukraina ingin lepas dari bayang bayang Rusia dan lebih mendekat ke Barat.

Ketegangan antara kedua negara diperparah pada Revolusi Oranye 2004, sebuah momen yang tidak hanya menantang *status quo* politik di Kyiv. Tetapi, secara simbolis menunjukkan bahwa Ukraina mengurangi pengaruh Rusia di negaranya. Revolusi Oranye atau revolusi kebangsaan di Ukraina pada tahun 2004 ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah politik negara Ukraina yang terjadi setelah pemilihan presiden Ukraina pada November 2004.¹⁸ Hasil kontroversial yang menguntungkan Yanukovich tidak hanya memicu protes domestik. Tetapi, mengungkapkan ketegangan yang mendalam antara dua visi yang bersaing untuk masa depan Ukraina, Viktor Yanukovich yang berorientasi pada integritas yang lebih erat dengan Rusia dan Viktor Yushchenko yang bercita-cita mendekatkan negara tersebut ke lembaga-lembaga Eropa.

¹⁷ Indriana Kartini, *Aneksasi Rusia Di Krimea Dan Konsekuensi Bagi Ukraina*, Jurnal Penelitian Politik 11 (2014).

¹⁸ Adib Izzuddin, Rossi Indrakorniawan, and Hastian Akbar Stiarso, *Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia - Ukraina Tahun 2022*, Jurnal Pena Wimaya 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.31315/jpw.v2i2.7226>.

Gerakan massal penolakan hasil pemilu memicu protes massal di ibukota Kyiv dan kota-kota besar lainnya. Ribuan pendukung Yushchenko turun ke jalan dengan membawa bendera oranye, warna kampanye Yushchenko. Aksi protes ini mulai dikenal sebagai “Revolusi Oranye”, gerakan ini memperjuangkan tuntutan untuk pemilu yang bebas dan adil, serta menginginkan Ukraina lebih dekat dengan Uni Eropa dan Barat secara umum. Ini dianggap sebagai gerakan pro-demokrasi dan pro-Barat. Ketegangan dengan Rusia mendukung Viktor Yanukovich dan menentang revolusi oranye. Hal ini, memicu ketegangan antara Ukraina dan Rusia. Karena, Rusia khawatir kehilangan pengaruh di Ukraina jika negara tersebut lebih condong ke Barat. Dampak revolusi setelah protes berkepanjangan, pemilu ulang diadakan pada Desember 2004 dan Viktor Yushchenko memenangkan kursi kepresidenan. Revolusi Oranye menjadi awal ketegangan antara Rusia dan Ukraina.¹⁹

Langkah selanjutnya yang diambil oleh pemerintah pro-Barat di Ukraina adalah menyatakan keinginan untuk bergabung dengan NATO pada tahun 2008. Upaya ini memicu reaksi keras dari Rusia yang menentang ekspansi NATO ke wilayah bekas Uni Soviet. Pada KTT NATO di Bucharest tahun 2008, Ukraina secara tegas menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan NATO, sedangkan Rusia dengan tegas menentang rencana Ukraina tersebut. Alasannya adalah Rusia khawatir ekspansi NATO ke wilayah bekas Uni Soviet akan mengancam kepentingan dan *sphere of influence* di kawasan tersebut. Rusia juga memandang langkah ini sebagai provokasi dan ancaman bagi keamanan nasionalnya. Rusia

¹⁹ Ibid.

memiliki kepentingan strategi di Ukraina, seperti pangkalan Angkatan Laut Krimea. Oleh karena itu, Rusia sangat keberatan jika Ukraina bergabung dengan NATO yang di pandang sebagai rival militer. Ketegangan dan konflik berkepanjangan akibat penentangan Rusia terhadap rencana Ukraina bergabung dengan NATO menjadi salah satu faktor yang memperkeruh ketegangan antara kedua negara. Ini juga dianggap sebagai salah satu pemicu konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang meletus pada tahun 2014.²⁰ Dengan demikian, keinginan Ukraina bergabung dengan NATO pada 2008 memicu reaksi keras dari Rusia yang merasa terancam dengan ekspansi aliansi militer Barat ke wilayah yang dianggap sebagai lingkaran pengaruhnya. Hal ini mencerminkan persaingan geopolitik antara Rusia dan barat dalam memperebutkan pengaruhnya di wilayah bekas Uni Soviet.

Namun, situasi berubah pada tahun 2010 ketika Viktor Yanukovych yang dianggap sebagai tokoh pro-barat berhasil memenangkan pemilihan presiden Ukraina. Kemenangan Yanukovych sementara waktu membuat hubungan Ukraina dan Rusia membaik. Latar belakang Viktor Yanukovych sebelumnya pernah kalah dalam Revolusi Oranye tahun 2004 yang didominasi oleh kubu pro-barat. Namun, pada 2010 berhasil memenangkan pemilu presiden dengan janji-janji memperbaiki ekonomi dan hubungan dengan Rusia. Viktor Yanukovych menolak bergabung dengan NATO dan memilih untuk mempererat kerjasama ekonomi dengan Rusia dan Uni Ekonomi Eurasia. Ukraina bergantung pada pasokan gas alam dan minyak dari Rusia, serta menjadi pasar penting bagi ekspor Rusia. Kebijakan pro-Rusia

²⁰ Crystalia Shabrina Najmi And Rani Lestyaningsih, *Upaya Resolusi Konflik Dalam Perang Rusia – Ukraina 2022*, Jurnal PIR: Power in International Relations, 2022, 97–105.

Yanukovych memicu ketegangan dengan Uni Eropa dan negara-negara barat lainnya yang menginginkan Ukraina lebih terintegrasi dengan mereka secara politik dan ekonomi. Namun, perbaikan hubungan Ukraina-Rusia dibawah Yanukovych hanya bersifat sementara. Karena, keadaan kembali memanas pada 2013-2014 ketika gelombang demonstrasi pro Eropa yang besar setelah presiden Viktor Yanukovych menolak untuk menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Peristiwa ini dikenal dengan Demonstrasi Euromaidan. Pada November 2013, Yanukovych menolak untuk menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Peristiwa ini memicu krisis politik yang mengakibatkan kudeta pada Februari 2014.²¹ Peristiwa ini menjadikan Ukraina lebih dekat dengan blok-Barat secara ekonomi dan politik. Keputusan ini memicu kemarahan besar di kalangan masyarakat Ukraina yang pro-Barat. Demonstrasi Euromaidan penolakan tersebut memicu demonstrasi massal di Kyiv dan kota-kota besar lainnya. Ribuan orang turun ke jalan untuk menuntut agar Yanukovych mengundurkan diri dan menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa. Kudeta menggulingkan Yanukovych pada Februari 2014, setelah berbulan-bulan demonstrasi dan kekerasan, Yanukovych akhirnya mengundurkan diri dan melarikan diri ke Rusia, parlemen Ukraina kemudian membentuk pemerintahan interim yang pro-Eropa. Reaksi Rusia dan aneksasi Krimea Rusia, yang mengganggu kudeta tersebut sebagai kudeta yang didukung Barat, bereaksi dengan mengambil alih semenanjung Krimea dari Ukraina secara sepihak. Ini memicu krisis terbesar antara

²¹ Fahri Ananta Said and Partogi J. Samosir, *Dampak Kudeta Presiden Viktor Yanukovych Dalam Hubungan Luar Negeri Ukraina Dengan Uni Eropa*, *International & Diplomacy* 3, no. 1 (2017): 139–65.

Rusia dan barat sejak perang dingin. Demonstrasi Euromaidan dan kudeta yang menggulingkan Yanukovych mencerminkan perpecahan dalam masyarakat Ukraina antara kubu pro-Barat dan pro-Rusia. Peristiwa ini juga memicu respons keras dari Rusia yang merasa kepentingannya di Ukraina terancam oleh pemerintah baru yang condong ke barat.²²

Pada tahun 2014, terjadi sebuah peristiwa geopolitik yang signifikan di Eropa Timur, ketika Rusia mengambil alih dan menganeksasi semenanjung Krimea, yang sebelumnya merupakan bagian dari Ukraina. Tahun 2014 menandai titik balik dalam hubungan Rusia-Ukraina dengan terjadinya serangkaian peristiwa geopolitik yang signifikan di Eropa Timur. Setelah penggulingan Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych, Rusia mengambil langkah agresif dengan menganeksasi semenanjung Krimea. Proses ini dimulai pada Februari-Maret 2014 ketika pasukan tanpa tanda pengenal, yang kemudian diakui sebagai pasukan Rusia, menguasai lokasi lokasi strategis di Krimea. Pada 16 Maret, diadakan referendum yang kontroversial, menghasilkan keputusan bergabung dengan Rusia, meskipun legitimasinya dikritik keras oleh komunitas aneksasi pada 18 Maret. Konflik segera meluas ke wilayah Donbas di Ukraina Timur, dimana kelompok separatis pro-rusia, dengan dukungan Moskow, menyatakan kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk pada April 2014. Ukraina merespons dengan operasi militer, memicu konflik bersenjata yang berkepanjangan. Dampak konflik ini sangat besar: ribuan korban jiwa, lebih dari satu juta pengungsi, kerusakan infrastruktur parah, dan kegagalan perjanjian gencatan senjata Minsk. Secara geopolitik, hubungan Rusia-

²² Ibid.

Ukraina memburuk drastis, ketegangan Rusia-Barat meningkat dan sanksi internasional dijatuhkan terhadap Rusia, mengubah lanskap politik Eropa secara fundamental.²³

Tindakan Rusia di Krimea dan dukungannya terhadap separatistis di Donbas dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan pengaruhnya di bekas negara Soviet dan mencegah Ukraina beralih lebih dekat ke Barat. Namun, tindakan ini dikecam luas sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan integrasi teritorial Ukraina. Konflik ini menjadi titik balik dalam hubungan Rusia-Barat dan membentuk ulang hubungan geopolitik di Eropa Timur.

2.2 Hubungan Ukraina dan Rusia Pasca 2014

Krisis politik yang melanda Ukraina pada tahun 2014 mengakibatkan perubahan drastis dalam hubungan Ukraina dan Rusia. Peristiwa 2014 Euromaidan, Aneksesi Krimea dan konflik Donbas adalah beberapa peristiwa yang memperburuk ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Di luar wilayah dan geopolitik, konflik ini juga merupakan pertarungan identitas, dimana kedua negara memiliki visi yang bertentangan tentang sejarah bersama dan masa depan mereka. Bagi Ukraina, 2014 menjadi momen pendirian ulang negara, mendorong upaya untuk membangun identitas nasional yang berbeda dari bayangan Rusia. Sebaliknya, tindakan Rusia mencerminkan penolakan untuk menerima Ukraina

²³ Dimasti Dano, *Analisis Dampak Konflik Rusia–Ukraina Terhadap Harga Bahan Bakar Minyak Indonesia*, CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan 2, no. 3 (2022): 261–69, diakses dari <https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i3.1494>.

sebagai entitas politik yang sepenuhnya berdaulat, memandang sebagai bagian dari “Dunia Rusia” yang lebih luas.²⁴

Dinamika ini telah mengubah hubungan bilateral menjadi konfrontasi multidimensi-militer, diplomatik, ekonomi dan budaya. Ketika kedua negara semakin terpolarisasi, ruang untuk kompromi menyusut. Kegagalan upaya perdamaian dan eskalasi retorika akhirnya membuka jalan bagi invasi Rusia pada 2022, menandai titik hadir baru dalam hubungan kedua negara. Rangkaian peristiwa ini menyoroti peran penting narasi dan identitas nasional dalam memengaruhi perkembangan politik internasional. Hal ini juga mempertanyakan stabilitas tatanan pasca-Soviet. Dimana negara-negara yang sebelumnya merupakan Uni Soviet kini menafsirkan kembali warisan sejarah mereka dalam konteks politik saat ini.

Konflik antara Rusia dan Ukraina berawal dari aneksasi ilegal Krimea oleh Rusia pada Maret 2014. Rusia mengambil alih dan mencaplok semenanjung Krimea dari Ukraina secara sepihak. Tindakan ini direspons oleh Ukraina dan mayoritas internasional sebagai pelanggaran hukum internasional. Hal ini memicu ketegangan baru dalam hubungan kedua negara. Selain Krimea, konflik juga meletus di wilayah Donbas, Ukraina timur sejak 2014 hingga sekarang. Pemberontakan kelompok pro-Rusia di sana memicu terbentuknya Republik “separatis” Donetsk dan Luhansk yang didukung secara militer Rusia. Upaya untuk menghentikan konflik bersenjata di wilayah Donbas, Ukraina Timur dilakukan melalui perundingan yang

²⁴ Marten Hanura, *Proses Integrasi Nasional Dalam Pembangunan Bangsa Ukraina: Merespon Momentum Euromaidan/47/HI/2022*, (Universitas Diponegoro, 2022).

membuahkan perjanjian Minsk II pada Februari 2015. Perjanjian ini merupakan inisiatif diplomasi yang difasilitasi oleh Jerman dan Prancis, serta melibatkan Rusia dan Ukraina sebagai pihak yang bersengketa. Secara garis besar, Minsk II bertujuan untuk mengakhiri permusuhan dengan menetapkan gencatan senjata, penarikan persenjataan berat, serta otonomi terbatas wilayah separatis di bawah kontrol pemerintah Ukraina. Namun demikian, implementasi perjanjian Minsk II mengalami kegagalan yang disebabkan pelanggaran gencatan senjata oleh kedua belah pihak secara berkelanjutan.²⁵ Pihak pro-Rusia di Donbes disebut-sebut melanjutkan operasi militer untuk merebut wilayah yang lebih luas, sementara Ukraina mengintensifkan serangan balasan. Selain itu, terdapat perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan butir-butir perjanjian. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses perdamaian. Eskalasi ketegangan pasca kegagalan perjanjian ini turut memicu invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 2022. Merespons aneksasi Krimea dan Konflik Donbas, negara-negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Sanksi ini menargetkan sektor keuangan, energi dan perlindungan Rusia. Rusia juga dikeluarkan dari kelompok Negara Industri Utama (G8) yang kini menjadi (G7). Secara geopolitik, Ukraina beralih dengan menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa pada tahun 2014 dan meningkatkan kerjasama dengan NATO sambil mencari keanggotaan penuh di kedua organisasi tersebut serta pada tahun 2022 Ukraina resmi menjadi kandidat resmi anggota Uni Eropa.²⁶

²⁵ Putri Agatha, *Faktor Penyebab Kegagalan Perjanjian Minsk II Dalam Menyelesaikan Konflik Ukraina Timur*, (Universitas Katolik Parahyangan, 2018).

²⁶ Fransiskus Atok, *Analisis Konflik Rusia Dan Ukraina*,*zz*" Jurnal Poros Politik 4, No. 1 (2022): 11–15, diakses dari <https://Doi.Org/10.32938/Jpp.V4i1.2502>.

Selain konflik dibidang geopolitik, Rusia dan Ukraina juga terlibat dalam “perang ekonomi” dengan saling membatasi atau melarang impor dari masing-masing negara.²⁷ Hal ini menyebabkan penurunan dalam perdagangan bilateral. Ketegangan juga meningkat di Laut Azov pada tahun 2018 ketika menangkap sejumlah kapal angkatan laut Ukraina dengan alasan pelanggaran wilayah perairan.

Hubungan antar kedua negara juga memperburuk dalam bidang keagamaan dan identitas. Upaya Ukraina untuk memperoleh kedaulatan politik juga diiringi dengan langkah untuk melepaskan diri dari pengaruh Gereja Ortodoks Rusia. Pada tahun 2019, Patriarki Ekumenis Konstantinopel memberikan status *autokefalous* (independen) kepada Gereja Ortodoks yang terpisah dari Patriarki Moskow, menandakan menguatnya identitas nasional Ukraina. Keputusan tersebut memperburuk ketegangan hubungan antara kedua gereja dan menjadi salah satu faktor yang memperkuat sentimen nasionalisme di kedua negara. Gereja Ortodoks Rusia mengancam keputusan Gereja Ortodoks Konstantinopel dan menuduhnya sebagai upaya politisasi isu keagamaan yang melanggar kanon gereja²⁸. Situasi ini menggambarkan bagaimana konflik rusia-Ukraina tidak hanya berdimensi teritorial dan militer, tetapi juga meliputi aspek identitas nasional, budaya dan pengaruh *soft power* yang saling bersaing antara kedua negara. Ukraina menjalankan program de-komunikasi dan de-rusifikasi serta membatasi media dan artis Rusia. Sementara Rusia menekankan konsep “satu bangsa” dengan Ukraina dan menuduh Ukraina sebagai “negara gagal”. Perang informasi dan retorika juga terjadi di antara kedua

²⁷ Dimasti Dano, *Op. Cit.*, hal. 29

²⁸ Hanura, *Op. Cit.*, hal. 30

negara. Perang informasi dan kampanye propaganda menjadi aspek penting dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Kedua belah pihak secara intensif melancarkan operasi penyebaran informasi untuk membentuk persepsi publik yang menguntungkan narasi resmi dalam rangka membenarkan aksi agresinya sebagai “operasi militer khusus” untuk melindungi warga etnis Rusia dan ancaman “Rezim Neo Nazi” di Kyiv dan membatasi pengaruh NATO. Mereka juga mengklaim Ukraina merupakan wilayah integral Rusia secara historis-kultural. Propaganda ini disebarakan melalui media domestik dan kampanye disinformasi di media sosial memanfaatkan akun palsu dan “troll farm”.

Sementara itu, Ukraina menggambarkan dirinya sebagai korban agresi militer Rusia yang tidak terprovokasi dalam upaya membela kedaulatan dan demokrasi. Pemerintah Ukraina menyebarkan informasi pelanggaran hukum perang Rusia untuk memperoleh simpati global. Mereka juga mengkampanyekan upaya heroik melawan kekuatan militer yang superior. Kampanye ini disebarakan melalui diplomasi publik intensif memohon bantuan negara-negara Barat dan organisasi internasional. Ukraina menggambarkan Rusia sebagai ancaman regional untuk mendorong dukungan eksternal. Kedua belah pihak memanfaatkan propaganda dan perang informasi. Kedua belah pihak memanfaatkan propaganda dan perang informasi untuk memobilisasi dukungan domestik dan internasional bagi kepentingan nasional masing-masing dalam konflik bersenjata tersebut.²⁹

²⁹ Edy Syahputra Sihombing and Maria Evangelina Setiawan, *Kerancuan Berpikir: Propaganda Publik Media Pro-Ukraina Dalam Situasi Perang Rusia-Ukraina 2022*, Sapiientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora 2, no. 02 (2022): 182–92, diakses dari <https://doi.org/10.26593/jsh.v2i02.6160>.

2.3 Operasi Militer Rusia ke Ukraina 2014-2022

Eskalasi ketegangan antara Rusia dan Ukraina meningkat drastis menjelang invasi pada Februari 2022. Sejak akhir 2021, Rusia mulai memusatkan kekuatan militernya di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Rusia juga mengajukan serangkaian tuntutan kepada NATO dan Amerika Serikat, termasuk jaminan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO.³⁰ Pada tanggal 21 Februari 2022, presiden Putin secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR), dua wilayah separatis pro-Rusia di kawasan Dones, Ukraina Timur. Langkah ini dianggap sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan Ukraina serta perjanjian Minsk yang disepakati sebelumnya untuk menyelesaikan konflik di Donbas. Rusia mengambil langkah lebih lanjut dengan mengakui kedaulatan republik separatis pro-Rusia Donetsk dan Luhansk di wilayah Donbas, Ukraina Timur. Komunitas Internasional, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, mengancam tindakan Rusia dan menganggapnya sebagai provokasi untuk membenarkan invasi militer.³¹

Pada 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi skala besar ke Ukraina.³² Hal ini menandai dimulainya perang terbuka antara kedua negara. Operasi militer Rusia menargetkan infrastruktur kritis dan pusat kekuasaan Ukraina dengan serangan roket dan udara. Invasi ini mengakhiri secara efektif harapan untuk

³⁰ Indriana Kartini, *Op. Cit.*, hal. 24

³¹ Ibid.

³² Gaizka Ayu Satura, *Pertanggungjawaban Rusia Atas Invasi Terhadap Ukraina*, Jurnal Ilmu Hukum: Alethea 5, no. 1 (2022): 73–90, diakses dari <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no1.p73-90>.

normalisasi hubungan pasca aneksasi Krimea tahun 2014. Selain itu juga menghancurkan harapan apapun untuk normalisasi hubungan kedua negara dan mengawali fase baru dalam konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina.

Serangan udara dan hujan rudal menghantam berbagai target di seluruh Ukraina. Pasukan Rusia melancarkan ofensif dari tiga arah: Utara (dari Rusia dan Belarus), Timur (dari wilayah separatis Donbas) dan selatan (dari Krimea yang diduduki Rusia). Tujuan awal invasi Rusia diduga untuk mencapai kudeta cepat dan menggulingkan pemerintahan presiden Zelenskyy di ibukota Kyiv. Dalam fase pertama invasi (Februari-April 2022) pertempuran sengit terjadi di sekitaran Kyiv, Chernihiv dan Sumy di utara Ukraina. Di selatan, kota Meriupol dikepung dan diserang habis-habisan oleh Rusia. Setelah gagal merebut Kyiv, Rusia kemudian menarik pasukannya dari wilayah utara Ukraina untuk mengkonsolidasikan kekuatannya di Timur dan selatan. Memasuki fase kedua pada september 2022, Ukraina berhasil melakukan serangan balik besar di wilayah Kharkiv dan Kherson. Menghadapi situasi ini, Rusia mengumumkan mobilisasi parsial tentaranya. Tak lama kemudian, Rusia juga mengklaim aneksasi atas empat wilayah Ukraina yang di dudukinya, yakni Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia.

Dalam konflik Rusia-Ukraina, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi jalannya pertempuran. Pertama, terdapat perbedaan signifikan antara doktrin militer Rusia dan realitas di medan perang. Sementara Rusia mengandalkan penggunaan artileri secara masif dan peperangan elektronik, Ukraina telah menunjukkan kemampuan adaptasi dan inovasi yang luar biasa dalam memanfaatkan teknologi modern dan taktik asimetris. Kedua, peran intelijen dan teknologi telah memberikan

keuntungan strategis bagi Ukraina. Dukungan intelijen dari negara-negara Barat memungkinkan Ukraina untuk mengantisipasi gerakan Rusia dan menargetkan dengan lebih efektif. Penggunaan drone seperti *Bayraktar* dan *Switchblade* telah memberi Ukraina kemampuan serangan presisi, sementara Starlink memfasilitasi komunikasi taktis yang handal. Ketiga, faktor logistik dan moral turut memengaruhi dinamika konflik. Rusia menghadapi masalah rantai pasokan yang signifikan, sementara pasukan Ukraina menunjukkan motivasi yang tinggi dalam mempertahankan tanah air mereka. Selain itu, korupsi yang meluas dan kepemimpinan buruk di lingkungan militer Rusia telah menghambat kemampuan mereka untuk melakukan operasi yang efektif.³³



³³ Gaizka Ayu Satura, *Op. Cit.*, hal. 34